

**PENGUATAN LITERASI DIGITAL DAN KOMUNIKASI ETIS BERBASIS KADER
PKK SEBAGAI MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ERA DIGITAL**
***STRENGTHENING DIGITAL LITERACY AND ETHICAL COMMUNICATION BASED
ON PKK CADRES AS A MODEL FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN THE
DIGITAL ERA***

Mahisa Dwi Prastowo¹, Luthfy Rijalul Fikri^{2*}

^{1,2}Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Pamulang

Email Koresponding: sdosen03120@unpam.ac.id

Abstract

The development of digital technology has brought significant changes to patterns of public communication, including at the level of local communities. On the other hand, low levels of digital literacy have the potential to generate various social problems, such as the spread of hoaxes, communication conflicts, and unethical communication practices. Unlike most digital literacy programs that primarily focus on the technical aspects of media use, this Community Service Program (Pengabdian kepada Masyarakat) adopts an approach that emphasizes strengthening the social role of PKK cadres as community communicators and digital literacy agents. This program aims to enhance digital literacy and ethical communication capacities among women PKK cadres in Kedaung Village through a participatory approach that integrates digital literacy training, reflective discussions based on local experiences, and contextual digital information verification practices. The novelty of this program lies in the integration of digital literacy, communication ethics, and the social functions of PKK cadres, resulting in a sustainable community-based empowerment model. The results indicate a significant improvement in participants' understanding of digital literacy, their ability to verify information, and their awareness of ethical communication in digital spaces. Moreover, PKK cadres not only became beneficiaries of the program but also transformed into active agents driving digital literacy within their families and communities. These findings affirm that strengthening digital literacy through community social roles is an effective and adaptive strategy for fostering a healthy, participatory, and ethical digital communication culture in the digital era.

Keywords: Digital Literacy, PKK, Ethical Communication, Community Empowerment, Community Service

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi masyarakat, termasuk pada tingkat komunitas lokal. Di sisi lain, rendahnya literasi digital berpotensi memunculkan berbagai persoalan sosial seperti penyebaran hoaks, konflik komunikasi, serta praktik komunikasi yang tidak etis. Berbeda dari kegiatan literasi digital pada umumnya yang berfokus pada aspek teknis penggunaan media, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menawarkan pendekatan berbasis penguatan peran sosial kader PKK sebagai komunikator komunitas dan agen literasi digital. PkM ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan kapasitas komunikasi etis ibu-ibu kader PKK Kelurahan Kedaung melalui pendekatan partisipatif yang mengintegrasikan pelatihan literasi digital, diskusi reflektif berbasis pengalaman lokal, serta praktik verifikasi informasi digital kontekstual. Kebaruan kegiatan ini terletak pada integrasi literasi digital dengan etika komunikasi dan fungsi sosial kader PKK, sehingga menghasilkan model pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang berkelanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap literasi digital, kemampuan verifikasi informasi, serta kesadaran etika komunikasi di ruang digital. Selain itu, kader PKK tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga bertransformasi menjadi aktor penggerak literasi digital di lingkungan keluarga dan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan literasi digital berbasis peran sosial komunitas merupakan strategi efektif dan adaptif dalam membangun budaya komunikasi digital yang sehat, partisipatif, dan beretika di era digital.

Kata kunci: Literasi Digital, PKK, Komunikasi Etis, Pemberdayaan Masyarakat, Pengabdian Kepada Masyarakat



CC Attribution-ShareAlike 4.0

Copyright © 2026 Author

Diterima: 29 Januari 2025; Disetujui: 8 Februari 2026; Terbit: 10 Februari 2026

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah membawa perubahan mendasar dalam cara masyarakat berkomunikasi, mengakses informasi, serta membangun relasi sosial. Kehadiran internet dan media sosial memungkinkan arus informasi bergerak secara cepat, lintas wilayah, dan tanpa proses penyaringan yang memadai. Kondisi ini membuka peluang besar bagi peningkatan partisipasi publik dan pertukaran pengetahuan, namun pada saat yang sama juga memunculkan tantangan serius berupa maraknya hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, serta konflik sosial berbasis komunikasi digital (Livingstone, 2019).

Di Indonesia, tingkat penetrasi internet yang telah melampaui 80% populasi menunjukkan bahwa media digital telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, tingginya tingkat akses tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Sejumlah survei nasional menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih mengalami keterbatasan dalam memahami etika komunikasi digital, keamanan data pribadi, serta kemampuan memverifikasi kebenaran informasi yang beredar di ruang digital (APJII, 2024; Katadata, 2025).

Keterbatasan literasi digital ini tidak hanya dialami oleh kelompok usia tertentu. Meskipun generasi muda mendominasi jumlah pengguna internet, kelompok usia dewasa—termasuk perempuan dan ibu rumah tangga—sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap misinformasi dan penipuan digital. Rendahnya keterampilan dalam memilah informasi serta minimnya kesadaran akan risiko dunia maya menjadikan kelompok ini sasaran utama berbagai praktik komunikasi digital yang merugikan (Nasrullah, 2020).

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, ibu-ibu kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memiliki posisi yang sangat strategis. Kader PKK berperan sebagai penggerak kegiatan keluarga dan komunitas, penyampai informasi, serta mediator antara masyarakat dan program-program pembangunan. Kedekatan mereka dengan lingkungan sosial menjadikan kader PKK sebagai agen perubahan yang potensial dalam membangun kohesi sosial dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di tingkat lokal (Suryani, 2018).

Namun, hasil observasi awal yang dilakukan di Kelurahan Kedaung menunjukkan bahwa sebagian kader PKK belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai literasi digital dan komunikasi etis di ruang maya. Keterbatasan tersebut berpotensi menjadikan mereka tidak hanya sebagai sasaran, tetapi juga sebagai perantara penyebaran informasi yang tidak akurat. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pelatihan literasi media, rendahnya pemahaman terhadap aspek hukum dan etika komunikasi digital, serta belum terbentuknya budaya diskusi yang sehat mengenai penggunaan media digital di kalangan kader PKK.

Permasalahan literasi digital tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan teknis menggunakan perangkat digital. Literasi digital juga mencakup kemampuan berpikir kritis dalam memilah informasi, memahami norma dan etika komunikasi digital, serta menjaga keamanan dan privasi data pribadi. Ketiga aspek tersebut masih menjadi persoalan serius yang dihadapi masyarakat, termasuk di lingkungan Kelurahan Kedaung (UNESCO, 2018).

Dalam praktik sehari-hari, aktivitas komunikasi digital kader PKK didominasi oleh penggunaan grup WhatsApp dan berbagai platform media sosial. Pola komunikasi yang berlangsung secara spontan dan tanpa pertimbangan kritis sering kali memicu kesalahpahaman, penyebaran informasi keliru, serta gesekan sosial. Ketiadaan pemahaman terhadap konteks pesan tertulis, pilihan kata, dan waktu penyampaian pesan menjadi faktor yang memperbesar potensi konflik dalam interaksi digital.

Rendahnya literasi digital juga berpotensi menimbulkan dampak lanjutan yang lebih luas, seperti menurunnya kualitas komunikasi dalam keluarga, meningkatnya konflik sosial di lingkungan masyarakat, maraknya hoaks yang tidak terkendali, serta terbentuknya pola konsumsi informasi yang keliru pada anak-anak yang meniru perilaku komunikasi orang tua. Tanpa adanya intervensi yang terstruktur dan berkelanjutan, ruang digital berisiko menjadi lingkungan yang tidak sehat dan bahkan menjadi sarana subur bagi praktik kriminalitas digital dan penipuan daring (Wardle & Derakhshan, 2017).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang sebagai bentuk intervensi strategis

untuk memperkuat literasi digital dan kemampuan komunikasi etis ibu-ibu kader PKK di Kelurahan Kedaung. Pelatihan literasi digital dipandang sebagai langkah penting untuk meningkatkan kapasitas kader PKK dalam memanfaatkan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan beretika. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan, hasil kegiatan, serta implikasi PkM dalam konteks pemberdayaan masyarakat berbasis literasi digital.

Kegiatan menggunakan konsep era informasi. Era informasi merujuk pada fase perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan dominasi teknologi informasi dan komunikasi dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Pada era ini, informasi menjadi sumber daya utama yang memengaruhi cara individu berinteraksi, bekerja, belajar, dan mengambil keputusan. Perkembangan internet dan media digital memungkinkan informasi diakses dan disebarluaskan secara cepat, luas, dan lintas batas geografis, sehingga membentuk pola komunikasi dan relasi sosial yang baru (Castells, 2010).

Era informasi juga ditandai oleh terbentuknya jaringan komunikasi global yang memengaruhi struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Setiap individu tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai produsen dan penyebar informasi. Kondisi ini membuka peluang besar bagi pertukaran pengetahuan dan partisipasi publik, namun sekaligus menghadirkan tantangan berupa meningkatnya penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, hoaks, dan disinformasi (Livingstone, 2019).

Dalam konteks era informasi, literasi digital menjadi kompetensi kunci yang harus dimiliki masyarakat. UNESCO (2011) mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, serta menggunakan informasi melalui teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Literasi digital tidak hanya mencakup keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat digital, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, pemahaman konteks sosial, serta partisipasi aktif dalam masyarakat berbasis informasi.

Bagi ibu-ibu kader PKK, literasi digital memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas sosial, pendidikan, dan ekonomi keluarga. Dengan literasi digital yang memadai, kader PKK dapat memanfaatkan internet untuk

memperoleh informasi yang relevan, berkomunikasi secara efektif, serta mengembangkan potensi kewirausahaan melalui platform digital. Dalam konteks Indonesia, peningkatan literasi digital juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan perempuan, mengingat masih adanya kesenjangan digital antara wilayah dan kelompok sosial (APJII, 2024).

Program pelatihan literasi digital yang ditujukan kepada ibu-ibu kader PKK, seperti yang dilaksanakan di Kelurahan Kedaung, merupakan langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan digital dan memperkuat peran perempuan dalam pembangunan masyarakat. Melalui pelatihan ini, kader PKK tidak hanya dibekali keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan untuk menghadapi tantangan negatif era informasi, seperti hoaks dan konten berbahaya di ruang digital (Kementerian Kominfo, 2023).

Kegiatan juga menggunakan konsep digital society. Digital society atau masyarakat digital merujuk pada kondisi masyarakat yang kehidupannya semakin bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi. Dalam masyarakat digital, teknologi digital menjadi infrastruktur utama yang mendukung berbagai aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Internet dan perangkat digital tidak lagi dipandang sebagai alat bantu, melainkan sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari (Van Dijk, 2020).

Masyarakat digital terbentuk melalui jaringan komunikasi global yang mengubah pola interaksi manusia. Aktivitas seperti pencarian informasi, transaksi ekonomi, pembelajaran, hingga komunikasi sosial kini banyak dilakukan secara daring. Kondisi ini menciptakan budaya baru yang menuntut individu untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh dunia digital (Nasrullah, 2020).

Bagi ibu-ibu kader PKK, masyarakat digital membuka berbagai peluang untuk pemberdayaan diri dan keluarga. Akses terhadap informasi kesehatan, pendidikan, serta peluang usaha berbasis digital memungkinkan kader PKK meningkatkan kualitas hidup keluarga dan komunitasnya. Media sosial dan platform digital juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan program PKK serta memperkuat jejaring sosial di tingkat lokal.

Namun demikian, partisipasi aktif dalam masyarakat digital menuntut kemampuan literasi digital yang memadai. UNESCO (2011) menegaskan bahwa literasi digital mencakup kemampuan memahami informasi, mengkritisi sumber informasi, serta menggunakan teknologi secara aman dan produktif. Tanpa literasi digital yang memadai, masyarakat berisiko mengalami eksklusi digital dan menjadi rentan terhadap berbagai dampak negatif, seperti penipuan daring dan pelanggaran privasi.

Di Indonesia, pemberdayaan perempuan melalui literasi digital menjadi isu penting dalam mewujudkan kesetaraan gender dan penguatan ekonomi keluarga. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa tingkat literasi digital perempuan masih perlu ditingkatkan, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses teknologi. Oleh karena itu, pelatihan literasi digital bagi ibu-ibu kader PKK di Kelurahan Kedaung menjadi intervensi penting untuk mempersiapkan mereka berpartisipasi aktif dalam masyarakat digital yang terus berkembang.

Kegiatan juga menggunakan konsep digital citizenship. Digital citizenship atau kewargaan digital merujuk pada norma, nilai, dan tanggung jawab individu dalam menggunakan teknologi digital secara etis, aman, dan bertanggung jawab. Konsep ini diperkenalkan oleh Ribble (2015) yang menekankan bahwa digital citizenship mencakup pemahaman, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi secara positif dalam dunia digital.

Digital citizenship meliputi berbagai aspek penting, antara lain keamanan digital, etika penggunaan teknologi, tanggung jawab sosial di dunia maya, keselamatan digital, serta literasi digital. Pemahaman terhadap aspek-aspek tersebut menjadi semakin penting di tengah meningkatnya penggunaan media digital dalam kehidupan sehari-hari (Ribble, 2015).

Dalam konteks ibu-ibu kader PKK, digital citizenship memiliki relevansi yang tinggi karena mereka berperan sebagai penggerak sosial dan pendidik informal di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pemahaman mengenai keamanan digital membantu kader PKK melindungi diri dan keluarga dari ancaman seperti penipuan daring dan pencurian data pribadi. Etika digital juga penting agar komunikasi yang dilakukan di

ruang maya tetap menghormati norma sosial dan menghindari konflik (Livingstone & Third, 2017).

Pelatihan literasi digital yang mengintegrasikan prinsip digital citizenship memungkinkan ibu-ibu kader PKK tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami tanggung jawab moral dan sosial dalam berinteraksi di dunia digital. Dengan demikian, mereka dapat menjadi teladan dalam penggunaan internet yang bijak serta agen perubahan yang menyebarkan nilai-nilai kewargaan digital kepada masyarakat sekitar.

Konsep terakhir yang juga digunakan adalah komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif merupakan proses komunikasi yang bertujuan memengaruhi sikap, pendapat, atau perilaku audiens melalui penyampaian pesan yang logis, emosional, dan etis. Konsep persuasi telah diperkenalkan sejak masa Aristoteles melalui tiga elemen utama, yaitu ethos (kredibilitas komunikator), pathos (pendekatan emosional), dan logos (argumentasi rasional) (Aristoteles, *Rhetoric*).

Dalam konteks pelatihan literasi digital, komunikasi persuasif menjadi keterampilan penting bagi ibu-ibu kader PKK. Melalui komunikasi persuasif, kader PKK dapat memotivasi keluarga dan masyarakat untuk menggunakan teknologi digital secara bijak, menghindari hoaks, serta menjaga keamanan dan privasi data pribadi.

Tujuan utama komunikasi persuasif dalam pelatihan literasi digital adalah meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya literasi digital, mendorong perubahan perilaku positif, serta membangun partisipasi aktif dalam pemanfaatan teknologi. Strategi komunikasi persuasif yang efektif meliputi penggunaan pesan yang relevan dengan pengalaman sehari-hari peserta, penyampaian informasi berbasis data, serta pendekatan emosional yang membangun kepercayaan dan motivasi (Perloff, 2017).

Penerapan komunikasi persuasif dalam pelatihan literasi digital membantu mengatasi berbagai tantangan, seperti rasa takut terhadap teknologi, keterbatasan akses, dan sikap skeptis terhadap manfaat dunia digital. Dengan pendekatan yang tepat, komunikasi persuasif dapat menciptakan perubahan sikap yang berkelanjutan dan memperkuat peran ibu-ibu kader PKK sebagai agen edukasi digital di lingkungan keluarga dan masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Transformasi digital yang masif telah menempatkan media digital sebagai medium utama komunikasi dan pertukaran informasi di masyarakat. Namun, kemudahan akses terhadap informasi digital tidak selalu diiringi dengan kemampuan literasi digital yang memadai, khususnya dalam hal verifikasi informasi, pemahaman etika komunikasi, serta kesadaran terhadap dampak sosial dari penggunaan media digital (Livingstone, 2019; UNESCO, 2011). Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyebaran hoaks, disinformasi, dan konflik sosial, terutama di tingkat komunitas lokal.

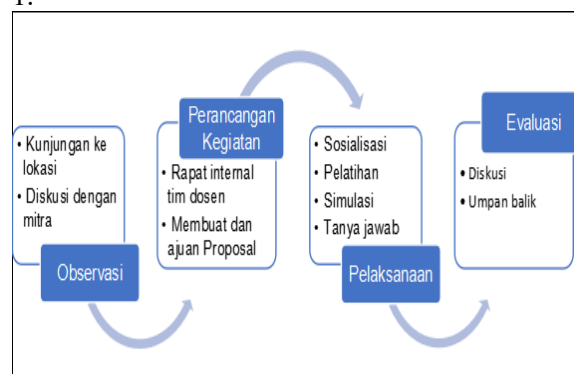
Ibu-ibu kader PKK Kelurahan Kedaung memiliki peran strategis sebagai penggerak sosial dan penyambung informasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Namun, hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian kader masih menghadapi keterbatasan dalam memahami karakteristik media digital, memilah kebenaran informasi, serta membangun pola komunikasi digital yang etis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan intervensi berbasis edukasi yang terstruktur untuk meningkatkan kapasitas literasi digital kader PKK.

Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah pelaksanaan pelatihan literasi digital yang dirancang secara partisipatif dan kontekstual. Pelatihan difokuskan pada pemberian pemahaman mengenai media digital, kemampuan verifikasi informasi, serta penguatan etika dan budaya bermedia digital yang bijak. Pendekatan interaktif dipilih agar materi dapat disesuaikan dengan latar belakang sosial, pendidikan, dan pengalaman organisasi para kader PKK, sehingga pelatihan tidak bersifat satu arah, melainkan dialogis dan reflektif (Perloff, 2017).

Pelaksanaan kegiatan PkM ini diajukan oleh dosen pelaksana melalui mekanisme institusional yang berlaku. Proses pengajuan diawali dengan penyampaian surat pemberitahuan dan proposal kegiatan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dengan persetujuan Ketua Program Studi dan Dekan. Proposal memuat tujuan, manfaat, rencana pelaksanaan, serta metode kegiatan. Setelah dinyatakan layak, Ketua LPPM menerbitkan surat tugas resmi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Seluruh rangkaian kegiatan didokumentasikan dan

dilaporkan dalam laporan akhir PkM, yang selanjutnya dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah sebagai bentuk diseminasi hasil pengabdian.

Realisasi pemecahan masalah dalam kegiatan PkM ini dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu observasi awal, perancangan kegiatan, pelaksanaan pelatihan, serta evaluasi dan tindak lanjut. Keempat tahapan tersebut dirancang secara sistematis dan berkelanjutan agar tujuan peningkatan literasi digital dapat tercapai secara optimal. Alur kegiatan PkM digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Proses Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Tahap Observasi Awal

Tahap observasi dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, dan karakteristik khalayak sasaran. Tim dosen pengabdian bersama perwakilan mitra melakukan diskusi awal dengan ibu-ibu kader PKK Kelurahan Kedaung. Fokus observasi meliputi tingkat pemahaman media digital, pola penggunaan media sosial, pengalaman menerima informasi negatif, serta tantangan komunikasi yang dihadapi dalam aktivitas organisasi dan kehidupan sehari-hari. Data yang diperoleh menjadi dasar dalam perancangan materi pelatihan yang kontekstual dan tepat sasaran (Nasrullah, 2020).



Gambar 2. Penyerahan Brosur UNPAM

2. Tahap Perancangan Kegiatan

Berdasarkan hasil observasi, tim pengabdian menyusun rancangan kegiatan yang meliputi penyusunan modul pelatihan, penjadwalan kegiatan, serta penunjukan fasilitator. Materi pelatihan dirancang dengan mengacu pada tiga pilar utama literasi digital, yaitu: (1) pemahaman media digital, (2) kemampuan verifikasi informasi, dan (3) pembangunan budaya penggunaan media digital yang bijak. Tim fasilitator terdiri dari dosen lintas program studi yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang komunikasi dan literasi digital.

3. Tahap Pelaksanaan Pelatihan dan Workshop

Pelaksanaan pelatihan merupakan inti kegiatan PkM dan dilakukan melalui beberapa sesi interaktif. Kegiatan diawali dengan diskusi ringan mengenai pengalaman peserta dalam menggunakan media digital, termasuk paparan terhadap hoaks dan informasi negatif. Selanjutnya, peserta diajak untuk mengidentifikasi ciri-ciri hoaks, menganalisis pesan-pesan bermuatan provokatif, serta mendiskusikan praktik komunikasi digital yang etis di lingkungan keluarga dan komunitas. Metode partisipatif digunakan agar peserta aktif terlibat dalam proses pembelajaran, berbagi pengalaman, serta melakukan refleksi kritis terhadap praktik bermedia digital yang selama ini dilakukan. Setiap sesi dilengkapi dengan umpan balik langsung dari fasilitator guna memperkuat pemahaman peserta dan memberikan ruang perbaikan secara konstruktif (Ribble, 2015).



Gambar 3. Pelaksanaan Pelatihan dan Diskusi

4. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Tahap evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui diskusi reflektif untuk mengukur perubahan pemahaman, sikap, dan kepercayaan diri peserta dalam berkomunikasi

di ruang digital. Selain itu, disusun rencana tindak lanjut berupa mentoring lanjutan, dokumentasi praktik terbaik, serta pembentukan forum diskusi komunitas sebagai upaya menjaga keberlanjutan hasil pelatihan. Pendekatan ini menekankan bahwa penguatan literasi digital merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan praktik dan refleksi kolektif (UNESCO, 2018).

5. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran kegiatan PkM ini adalah ibu-ibu kader PKK Kelurahan Kedaung dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang. Peserta dipilih berdasarkan keterlibatan aktif dalam kegiatan PKK dan peran strategis mereka sebagai penggerak sosial di tingkat keluarga dan komunitas.



Gambar 4. Khalayak Sasaran, Kader PKK

6. Tempat dan Waktu

Kegiatan pelatihan dilaksanakan secara luring (*offline*) dan terpusat di Kantor Kelurahan Kedaung bersama ibu-ibu kader PKK pada tanggal 25 November 2025.

7. Metode Kegiatan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *sharing* interaktif, yaitu kombinasi antara penyampaian materi teoritis dan diskusi partisipatif. Pendekatan ini dipilih untuk mendorong keterlibatan aktif peserta, memperkuat pemahaman konseptual, serta mengaitkan materi dengan pengalaman nyata peserta (Perloff, 2017).

8. Materi pelatihan meliputi:

1. Pengenalan komunikasi dan media digital.
2. Bahaya hoaks dan disinformasi di media digital.
3. Empati dan pembangunan budaya bermedia digital yang positif.
4. Praktik komunikasi persuasif dalam mengajak bermedia digital secara bijak.

9. Metode pembelajaran yang diterapkan:

1. Penilaian tidak langsung melalui diskusi informal.
2. Sesi pra-pelatihan (briefing, pengenalan, dan *ice breaking*).
3. Ceramah interaktif.
4. Umpan balik dan refleksi bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pelaksanaan PKM di PKK Kelurahan Kedaung

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berupa pelatihan literasi digital bagi ibu-ibu kader PKK Kelurahan Kedaung memberikan hasil yang signifikan baik dari aspek kognitif, afektif, maupun keterampilan praktis peserta. Kegiatan ini dirancang sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat, khususnya kader PKK, untuk memiliki kemampuan literasi digital yang memadai dalam menghadapi dinamika komunikasi dan informasi di era digital.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, terlihat adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep dasar literasi digital, meliputi penggunaan media sosial secara bijak, kesadaran terhadap bahaya hoaks, serta pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi terlibat aktif dalam diskusi dan praktik langsung, yang menunjukkan adanya proses pembelajaran partisipatif.

Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan PKM ini juga berdampak pada peningkatan keterampilan teknis peserta dalam memanfaatkan perangkat digital, khususnya smartphone. Ibu-ibu kader PKK menjadi lebih terampil dalam menggunakan media digital untuk komunikasi organisasi, pencarian informasi yang relevan, serta promosi kegiatan PKK di lingkungan kelurahan. Hal ini memperlihatkan bahwa literasi digital tidak hanya dipahami sebagai kemampuan teknis, tetapi juga sebagai sarana penguatan peran sosial dan organisasi.

Lebih lanjut, kegiatan ini menumbuhkan kesadaran kritis peserta terhadap konsekuensi penggunaan teknologi digital. Peserta mulai memahami bahwa teknologi digital memiliki potensi positif untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi keluarga, namun juga mengandung risiko

apabila digunakan tanpa pemahaman dan etika yang memadai. Dengan demikian, kader PKK diharapkan mampu berperan sebagai agen literasi digital yang menularkan pengetahuan dan sikap bijak bermedia digital kepada keluarga dan masyarakat sekitar.

Pelaksanaan Kegiatan PKM

Pelaksanaan PKM dilakukan dengan mengintegrasikan kegiatan pelatihan ke dalam agenda rutin pertemuan kader PKK Kelurahan Kedaung. Strategi ini terbukti efektif karena peserta tidak merasa terbebani oleh kegiatan tambahan yang bersifat formal dan terpisah dari aktivitas keseharian mereka. Sebaliknya, PKM dipersepsikan sebagai bagian dari kegiatan rutin yang memberikan nilai tambah.

Kegiatan diawali dengan sesi *ice breaking*, pengenalan, dan *briefing* yang dilaksanakan dalam suasana semi formal. Pendekatan ini dipilih untuk menciptakan suasana yang santai, egaliter, dan kondusif bagi proses belajar. Tim PKM menjelaskan tujuan kegiatan serta pendekatan pelatihan yang bersifat partisipatif dan dialogis, sehingga peserta merasa dihargai dan memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat.

Dalam pelaksanaan pelatihan, instruktur menegaskan bahwa kegiatan ini tidak menempatkan akademisi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Sebaliknya, pelatihan dikemas sebagai ruang berbagi pengalaman antara akademisi dan praktisi. Ibu-ibu kader PKK diposisikan sebagai subjek aktif yang memiliki pengalaman nyata dalam praktik komunikasi sehari-hari. Pendekatan ini berhasil menghilangkan kesan hierarkis dan mendorong keterlibatan aktif peserta dalam diskusi.

Kebebasan peserta untuk menyanggah, mengkritisi, atau mengembangkan materi yang disampaikan juga menjadi salah satu faktor keberhasilan kegiatan. Dengan demikian, pelatihan tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses reflektif yang memperkuat kepercayaan diri dan kapasitas berpikir kritis peserta.

Diskusi Mengenai Hoaks Digital

Diskusi mengenai hoaks digital menjadi salah satu sesi paling dinamis dan relevan dalam kegiatan PKM. Hal ini disebabkan oleh tingginya intensitas interaksi ibu-ibu kader PKK dengan media sosial dan aplikasi pesan instan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta mengungkapkan bahwa mereka kerap menerima berbagai informasi yang

meragukan kebenarannya, terutama melalui grup WhatsApp keluarga dan lingkungan.

Melalui diskusi ini, teridentifikasi bahwa hoaks umumnya disajikan dalam bentuk pesan provokatif, menggunakan judul sensasional, serta disertai ajakan untuk segera menyebarkan informasi. Banyak peserta mengakui bahwa sebelumnya mereka cenderung meneruskan informasi tersebut tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan isu kesehatan, sosial, atau kebijakan publik.

Fasilitator kemudian mengarahkan diskusi pada pengenalan ciri-ciri hoaks serta pentingnya sikap kritis dalam menerima informasi digital. Peserta diajak untuk memahami bahwa tidak semua informasi yang beredar di media sosial dapat dipercaya, dan bahwa verifikasi informasi merupakan tanggung jawab sosial setiap pengguna media digital.

Hasil diskusi menunjukkan adanya perubahan sikap peserta terhadap informasi digital. Peserta menjadi lebih berhati-hati dan selektif dalam menerima serta menyebarkan informasi. Selain itu, muncul kesepakatan bersama untuk saling mengingatkan dalam grup PKK agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Hal ini menandakan bahwa diskusi hoaks tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku bermedia digital yang lebih bertanggung jawab.

Diskusi Bermedia Sosial yang Sehat

Diskusi mengenai penggunaan media sosial yang sehat difokuskan pada peningkatan kesadaran peserta terhadap etika, tanggung jawab, dan keamanan dalam bermedia sosial. Media sosial dipahami tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang publik yang memiliki konsekuensi sosial apabila digunakan secara tidak bijak.

Melalui diskusi interaktif, peserta berbagi pengalaman terkait konflik, kesalahpahaman, atau ketidaknyamanan yang pernah terjadi akibat penggunaan media sosial. Pemateri kemudian mengaitkan pengalaman tersebut dengan konsep bermedia sosial yang sehat, seperti pentingnya menjaga bahasa, menghormati perbedaan pendapat, serta tidak menyebarkan konten yang berpotensi menimbulkan konflik.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah aktif menggunakan media sosial, namun belum sepenuhnya

memahami prinsip etika digital. Setelah mengikuti sesi ini, peserta mulai menyadari peran strategis mereka sebagai kader PKK dalam memberikan contoh penggunaan media sosial yang positif bagi keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, diskusi ini berkontribusi pada penguatan peran sosial kader PKK sebagai teladan dalam bermedia sosial yang sehat.

Diskusi Verifikasi Informasi Digital

Sesi diskusi verifikasi informasi digital menekankan pentingnya kemampuan memilah dan memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dalam konteks masyarakat, kader PKK sering menjadi rujukan informasi bagi warga, sehingga kemampuan ini menjadi sangat krusial.

Peserta diajak untuk memahami langkah-langkah sederhana dalam melakukan verifikasi informasi, seperti memeriksa sumber, konteks, dan kesesuaian informasi dengan sumber resmi. Diskusi berlangsung interaktif dengan menganalisis contoh-contoh informasi yang sering diterima peserta.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman baru mengenai pentingnya sikap kritis dan tidak tergesa-gesa dalam menyebarkan informasi. Diskusi ini memperkuat kesadaran peserta akan tanggung jawab sosial dalam menjaga kualitas informasi di lingkungan masyarakat.

Membangun Budaya Komunikasi Digital Secara Bijak

Diskusi mengenai budaya komunikasi digital yang bijak difokuskan pada penguatan etika dan norma dalam berkomunikasi secara online. Peserta menyadari bahwa komunikasi digital sering kali memicu kesalahpahaman karena keterbatasan ekspresi nonverbal dan perbedaan interpretasi.

Melalui diskusi ini, peserta memahami pentingnya memilih kata-kata yang tepat, mengendalikan emosi, dan menghargai perbedaan pendapat dalam komunikasi online. Budaya komunikasi digital yang bijak dipandang sebagai fondasi penting dalam menjaga keharmonisan sosial di lingkungan masyarakat.

Penguatan Nilai Pemberdayaan Masyarakat dan Sinergi dengan Mitra

Kegiatan PKM ini mendapat apresiasi positif dari pihak Kelurahan dan pengurus PKK. Dukungan tersebut tercermin dari rekomendasi agar kegiatan serupa dilaksanakan secara berkelanjutan dan melibatkan lebih banyak

elemen masyarakat, termasuk tokoh pemuda dan kader sosial lainnya.

Rekomendasi untuk penyusunan modul literasi digital juga menunjukkan bahwa kegiatan PKM ini dinilai relevan dan memiliki potensi untuk direplikasi. Dari perspektif tim pelaksana, dukungan mitra membuka peluang pengembangan model PKM berbasis komunitas PKK yang berkelanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berjudul "*Pelatihan Literasi Digital Kader PKK Kelurahan Kedaung*", dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program PKM ini terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kader PKK terkait literasi digital, komunikasi etis, serta pengelolaan informasi dan partisipasi masyarakat secara bertanggung jawab.

Hasil observasi, pre-test, serta evaluasi pascapelatihan menunjukkan adanya perubahan signifikan pada peserta, khususnya dalam memahami prinsip-prinsip komunikasi etis, membedakan antara ajakan partisipatif dan tekanan sosial, serta menerapkan pola komunikasi yang lebih persuasif, inklusif, dan empatik dalam kegiatan PKK. Peserta juga menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan kegiatan dan dokumentasi digital yang dapat diakses oleh anggota.

Lebih lanjut, kegiatan PKM ini menegaskan peran strategis ibu-ibu PKK sebagai agen perubahan sosial di tingkat komunitas. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi kegiatan, tetapi juga sebagai penghubung komunikasi antara warga, pengurus PKK, dan pemerintah kelurahan. Penguatan kapasitas komunikasi dan literasi digital kader PKK terbukti mampu mencegah potensi praktik komunikasi tidak etis, misinformasi, serta tekanan sosial yang dapat merugikan masyarakat.

Dengan demikian, kegiatan PKM ini memberikan kontribusi nyata dalam membangun budaya komunikasi yang etis, partisipatif, dan transparan di lingkungan Kelurahan Kedaung. Model pelatihan berbasis komunitas ini berpotensi untuk direplikasi di

wilayah lain sebagai upaya preventif dalam memperkuat tata kelola komunitas yang bersih, akuntabel, dan inklusif di era digital.

Saran

Berdasarkan hasil dan temuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang telah dilaksanakan, beberapa saran yang dapat diajukan untuk pengembangan dan keberlanjutan program adalah sebagai berikut:

1. **Bagi Kader PKK**, diharapkan untuk terus mengembangkan dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan komunikasi etis dan literasi digital yang telah diperoleh dalam kegiatan sehari-hari. Proses internalisasi nilai-nilai komunikasi yang sehat membutuhkan pembiasaan berkelanjutan dan refleksi kritis dalam setiap aktivitas organisasi dan sosial.
2. **Bagi Pengurus PKK dan Pemerintah Kelurahan**, disarankan untuk mendukung keberlanjutan program serupa melalui agenda pelatihan lanjutan, pendampingan, atau forum diskusi rutin. Dukungan kelembagaan sangat penting agar praktik komunikasi etis dan transparansi dapat menjadi budaya organisasi, bukan sekadar hasil pelatihan sesaat.
3. **Bagi Tim PKM Selanjutnya**, kegiatan literasi digital sebaiknya dikembangkan dengan materi yang lebih mendalam, seperti manajemen konflik komunikasi komunitas, etika komunikasi di media sosial, serta penguatan literasi partisipatif berbasis digital. Hal ini penting untuk menyesuaikan dinamika tantangan komunikasi di era multikomunikasi.
4. **Bagi Peneliti Selanjutnya**, disarankan untuk melakukan kajian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau longitudinal guna mengukur dampak jangka panjang pelatihan literasi digital terhadap perubahan perilaku komunikasi dan tata kelola komunitas.

Melalui penguatan program yang berkelanjutan dan kolaboratif, diharapkan kegiatan PKM serupa dapat memberikan dampak yang lebih luas dalam membangun masyarakat yang melek digital, beretika, dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- APJII. (2024). *Laporan survei penetrasi dan perilaku internet Indonesia tahun 2024*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Aristotle. (1991). *On rhetoric: A theory of civic discourse* (G. A. Kennedy, Trans.). Oxford University Press. (Original work published ca. 350 BCE)
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Katadata Insight Center. (2025). *Indeks literasi digital Indonesia 2025*. Katadata.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Peta jalan literasi digital Indonesia 2021–2024*. Kementerian Kominfo RI.
- Livingstone, S. (2019). *Audiences in an age of datafication: Critical questions for media research*. *Television & New Media*, 20(2), 170–183. <https://doi.org/10.1177/1527476418811118>
- Livingstone, S., & Third, A. (2017). *Children and young people's rights in the digital age: An emerging agenda*. *New Media & Society*, 19(5), 657–670. <https://doi.org/10.1177/1461444816686318>
- Nasrullah, R. (2020). *Literasi media sosial: Pendidikan masyarakat digital*. Simbiosis Rekatama Media.
- Perloff, R. M. (2017). *The dynamics of persuasion: Communication and attitudes in the 21st century* (6th ed.). Routledge.
- Ribble, M. (2015). *Digital citizenship in education: Nine elements all students should know* (3rd ed.). International Society for Technology in Education.
- Suryani, I. (2018). *Peran kader PKK dalam pemberdayaan masyarakat*. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 45–56.
- UNESCO. (2011). *Media and information literacy curriculum for teachers*. UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2018). *A global framework of reference on digital literacy skills for indicator 4.4.2*. UNESCO Institute for Statistics.
- Van Dijk, J. (2020). *The network society: Social aspects of new media* (4th ed.). SAGE Publications.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking*. Council of Europe.